

# PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Adrianus Ketmoin<sup>1</sup>, Ronald E. Renoat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, <sup>2</sup>Jurusan Administrasi Bisnis,  
Politeknik Negeri Kupang  
Email: [ketmoin.adrian@yahoo.com](mailto:ketmoin.adrian@yahoo.com)

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004-2018. 2) Untuk mengetahui Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004-2018. 3) Untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004-2018.

Penelitian ini menggunakan Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, dengan tingkat signifikan 5%. Terdapat 60 sampel dalam penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan Eviews 10 yang dianalisis dengan teknik analisis data yaitu 1) Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 2) statistik Inferensial yang terdiri dari analisis regresi linear berganda 3) Uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengeluaran pemerintah pada belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,0283. 2) Pengeluaran pemerintah pada belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,0419. 3) Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,0014. 4) Secara simultan pengeluaran pemerintah pada belanja langsung dan belanja tidak langsung dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,001901. 5) Nilai *Adjusted R-squared* dalam penelitian ini adalah 0,654544 berarti nilai kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 65,45%. Sedangkan 34,55% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diharapkan 1) Pemerintah meningkatkan Pengeluaran Pemerintah khususnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan melihat dan menggali potensi PAD. 2) Pemerintah meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan pelatihan khusus untuk tenaga kerja serta berwirausaha.

**Kata Kunci :** *Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi*

## Abstract

The purpose of this study is 1) To determine the effect of government spending on economic growth in the province of East Nusa Tenggara in 2004-2018. 2) To determine the Effect of Labor on Economic Growth in the Province of East Nusa Tenggara in 2004-2018. 3) To find out the Effects of Government and Labor Expenditures on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province in 2004-2018.

This study uses quantitative data that is data obtained in the form of numbers. Data Sources used in this study are secondary data, i.e. data sources that do not directly provide data to data collectors, for example through other people or through documents, with a significant level of 5%. There were 60 samples in this study then processed using Eviews 10 which were analyzed with data analysis techniques, namely 1) Classic assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test. 2) Inferential statistics consisting of multiple linear regression analysis 3) Hypothesis testing consisting of t test, F test, and the coefficient of determination test.

The results showed: 1) Government expenditure on direct expenditure has a positive and significant effect on economic growth with a probability of 0.0283. 2) Government expenditure on indirect expenditure has a positive and significant effect on economic growth with a probability of 0.0419. 3) Labor has a positive and significant effect on economic growth with a probability of 0.0014. 4) Simultaneously government expenditure on direct and indirect expenditure and labor influences economic growth with a probability of 0.001901. 5) Adjusted R-squared value in this study is 0.654544 meaning the contribution value of all independent variables in explaining the dependent variable is 65.45%. While the remaining 34.55% is explained by other variables not included in this study.

Based on the results of the research above, it is expected that 1) The Government increases Government Expenditures especially direct and indirect expenditures by looking at and exploring the potential of PAD. 2) The government increases labor productivity with special training for workers and entrepreneurship.

**Keywords:** Government Expenditure, Labor, Economic Growth

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada faktor-faktor perkembangan produksi, yaitu modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno,2000).

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong

maupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun disisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dihadapi oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhannya masih rendah. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi.

Selain pengeluaran pemerintah, maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Tenaga kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan

ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah usia penduduk usia produktif yang besar akan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018**

Th	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	Pengeluaran Pemerintah		Tenaga Kerja (jiwa)
		Belanja Langsung (ribu Rp)	Belanja Tidak Langsung (ribu Rp)	
2014	5,05	955.008.639	1.733.924.105	2.174.228
2015	4,92	1.235.775.575	2.053.350.765	2.219.291
2016	5,12	1.459.002.857	2.439.587.700	2.277.068
2017	5,11	1.544.477.238	3.090.398.944	2.320.061
2018	5,13	1.628.877.241	3.218.361.035	2.411.533
<b>Rata-rata</b>	<b>5,07</b>	<b>1.364.628.310</b>	<b>2.507.124.510</b>	<b>2.280.436</b>

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2018 menunjukkan terjadinya fluktuasi. Laju pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata

relatif rendah yakni sebesar 5,07persen per tahun. Bahkan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi menurun hingga 4,92 persen. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2016 naik hingga mencapai 5,12 persen, walau demikian pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 5,11 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 5,13 persen. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2014-2018. Ditunjukkan bahwa perkembangan belanja langsung dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp.955.008.639 pada tahun 2014 menjadi Rp.1.628.877.241 pada tahun 2018. Sedangkan perkembangan belanja tidak langsung juga mengalami peningkatan dari Rp.1.733.924.105 pada tahun 2014 menjadi Rp.3.218.361.035 pada tahun 2018. Dan ditunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat diserap oleh pasar kerja sejak tahun 2014 sebesar 2.174.228 jiwa menjadi 2.411.533 jiwa pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan belum terserapnya secara maksimal tenaga kerja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan potensi yang mungkin timbul dari besarnya tingkat perkembangan tenaga kerja yang belum bekerja adalah masalah keterbelakangan serta permasalahan sosial yang berakibat pada lambatnya prospek pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat mengatasi ketimpangan sosial ekonomi (Raharjo,2006).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola kawasannya termasuk kebijakan-kebijakan pembiayaan.

Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan yaitu pembelanjaan (pembangunan dan rutin) dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan yaitu dengan pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) dan investasi pemerintahan (belanja pembangunan atau barang-barang modal).

Melihat fenomena dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi yang berakibat pada rendahnya pendapatan perkapita penduduknya, belum maksimalnya tenaga kerja yang belum terserap dalam pasar kerja maka kiranya perlu diteliti lebih mendalam tentang pengaruh yang timbul dari pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja serta implikasinya pada pertumbuhan ekonomi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

### **Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

### **Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah dilihat dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sementara itu, belanja pegawai yang dimaksud dalam rincian belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, penghasilan dan tunjangan bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang-undang dan tambahan penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD.

### **Pengertian Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung**

Belanja Langsung atau disingkat BL, yaitu belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagikan menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal

hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Belanja Tidak Langsung atau disingkat BTL, yaitu belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
- Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun

anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- Belanja bagi hasil digunakan Lewis dalam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain.

### **Teori Ketenagakerjaan**

Ada beberapa teori penting yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan diantaranya adalah teori Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan merupakan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Menurut teori Fei- Ranis yang berkaitan dengan negara berkembang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumberdaya alamnya belum dapat diolah, sebagian penduduknya bergerak disektor pertanian, banyak pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama dimana pengangguran semu dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerjaan pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih dari upah institusional. Ketiga, dimana tahap awal ditandai dengan pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output yang lebih daripada perolehan upah konstitusional, biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa lebih banyaknya penawaran terhadap permintaan dibidang penawaran tenaga kerja.

### **Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam Model Makroekonomi Yang Dikembangkan Oleh Keynes, Peningkatan Pdb Dipengaruhi Oleh Kenaikan Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Net Ekspor. Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Terjadi Seiring Dengan Peningkatan Kegiatan Perekomian. Pengeluaran Pemerintah Dalam Penelitian Ini Adalah Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung. Dengan Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah Maka Akan Mempengaruhi Konsumsi Yang Terjadi Di Masyarakat. Selain Itu Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Maupun Pendidikan Juga Mempengaruhi Peningkatan Produktivitas Yang Berdampak Pada Peningkatan Output Produksi, Sehingga Mampu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pemerintah Harus Menggunakan Perangkat Perpajakan, Pembelajaran Dan Peraturan Moneter Untuk Menggapai Stabilitas Dan Pertumbuhan Ekonomi, Mengurangi Inflasi Dan Pengangguran Serta Memacu Pertumbuhan Ekonomi Secara Keseluruhan

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakn fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk Nasional dan APBD untuk daerah dan wilayah. Tujuan dari kebijakn fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

### **HUBUNGAN TENAGA KERJA DENGAN PELAKU EKONOMI**

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai tenaga kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, tenaga kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, peranan tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja

(dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern

Tenaga Kerja Didefinisikan Sebagai Penduduk Berumur 10 Tahun Atau Lebih Yang Bekerja, Mencari Pekerjaan, Dan Sedang Melakukan Kegiatan Lain, Seperti Sekolah Maupun Mengurus Rumah Tangga Dan Penerima Pendapatan (Simanjuntak).

Tenaga Kerja Didefinisikan Sebagai Penduduk Berumur 10 Tahun Atau Lebih Yang Bekerja, Mencari Pekerjaan, Dan Sedang Melakukan Kegiatan Lain, Seperti Sekolah Maupun Mengurus Rumah Tangga Dan Penerima Pendapatan (Simanjuntak).

Dalam Model Sederhana Tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pada Umumnya Pengertian Tenaga Kerja Diartikan Sebagai Tenaga Kerja Yang Bersifat Homogen. Menurut Lewis, Tenaga Kerja Yang Homogen Dan Tidak Terampil Dianggap Bisa Bergerak Dan Beralih Dari Sektor Tradisional Ke Sektor Modern Secara Lancar Dan Dalam Jumlah Tidak Terbatas. Dalam Keadaan Demikian, Peranan Tenaga Kerja Mengandung Sifat Elastisitas Yang Tinggi. Meningkatnya Permintaan Atas Tenaga Kerja (Dari Sektor Tradisional) Bersumber Pada Ekspansi Kegiatan Sektor Modern.

Dengan Demikian, Salah Satu Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Adalah Tenaga Kerja. Sumber Daya Manusia Merupakan Salah Satu Faktor Dinamika Dalam Perkembangan Ekonomi Jangka Panjang Bersamaan Dengan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Alam Dan Kapasitas Produksi. Pertumbuhan Penduduk Dan Tenaga Kerja Dianggap Sebagai Faktor Positif Dalam Merangsang Pertumbuhan Ekonomi.

Jumlah Tenaga Kerja Yang Besar Dapat Berarti Menambah Jumlah Tenaga Produktif. Dengan Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Diharapkan Akan Meningkatkan Produksi, Yang Berarti Akan Meningkatkan Pula Pdrb.

Menurut Nicholson W (1991) Bahwa Suatu Fungsi Produksi Pada Suatu Barang Atau Jasa Tertentu (Q) Adalah  $Q = F(K,L)$  Dimana K Merupakan Modal Dan L Adalah Tenaga Kerja Memperlihatkan Jumlah Maksimum Sebuah Barang/Jasa Yang Dapat

Diproduksi Dengan Menggunakan Kombinasi Alternatif Antara K Dan L, Maka Apabila Salah Satu Masukan Ditambah Satu Unit Tambahan Dan Masukan Lainnya Dianggap Tetap Akan Menyebabkan Tambahan Keluaran Yang Dapat Diproduksi.

### Hipotesis

Dari Uraian latar belakang serta rumusan masalah, penulis memunculkan hipotesis dalam penelitian, yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

## 3. METODE PENELITIAN

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan waktu dan pengumpulan data yakni selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Januari sampai Juni 2020.

### Definisi Operasional Variabel

Untuk memberi Pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian, maka variabel-variabel tersebut di definisikan secara operasional dan diukur sebagai berikut:

**Tabel 2**

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

NO	Variabel-Variabel	Pengertian	Satuan
1.	Belanja Langsung	Belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.	Rupiah (Rp)
2.	Belanja Tidak Langsung	Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan	

		produktivitas atau tujuan organisasi.	
2.	Tenaga kerja	Penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa.	Jiwa
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang dilihat dari kenaikan nilai PDRB. Nilai PDRB tersebut menunjukkan peningkatan output rill yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah nilai laju PDRB atas dasar harga konstan tahun 2014-2018.	Persen

Tabel 2

**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

NO	Variabel-Variabel	Pengertian	Satuan
1.	Belanja Langsung	Belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.	Rupiah (Rp)
2.	Belanja Tidak Langsung	Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi.	
2.	Tenaga kerja	Penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau	Jiwa

		jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa.	
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang dilihat dari kenaikan nilai PDRB. Nilai PDRB tersebut menunjukkan peningkatan output rill yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah nilai laju PDRB atas dasar harga konstan tahun 2014-2018.	Persen

**Jenis dan Sumber Data**

**Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka melainkan dalam kata verbal.

**Data Kuantitatif**

Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2010). Yang menjadi data kuantitatif dari penelitian ini adalah Data Tenaga Kerja Provinsi NTT, Data Pengeluaran Pemerintah Provinsi NTT, dan Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT.

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Studi Kepustakaan, pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan acuan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.



Data yang diperoleh adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian, data diambil dari Badan pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang diambil bersifat Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka pasti. Data yang dikumpulkan merupakan data berkala/time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan atau kecenderungan keadaan/peristiwa/kegiatan khususnya untuk Tenaga kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.

#### **Teknik Analisis**

Penelitian ini menggunakan analisis data time series sebagai alat analisis data dengan menggunakan program *evIEWS 10*. Data *time series* dapat dicatat berdasarkan periode waktu harian, mingguan, bulanan, tahunan, ataupun periode waktu tertentu lainnya dalam waktu yang sama (Crier, 2008).

#### **4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pembahasan hasil penelitian dilakukan berdasarkan hasil analisis secara statistik inferensial, dan uji hipotesis. Pembahasan hasil penelitian juga mengkaitkan dengan teori yang dipakai dalam penelitian dan membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan. Secara lengkap dibahas dalam sajian berikut ini.

##### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil regresi ditemukan bahwa Pengeluaran Pemerintah yang dilihat dari Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika diasumsikan apabila Belanja Langsung meningkat sebesar 1% maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 2.524273. Pengeluaran Pemerintah yang dilihat dari Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika diasumsikan apabila Belanja Tidak Langsung meningkat sebesar

1% maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 1.838676. Pengeluaran Pemerintah yang dilihat dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, artinya semakin meningkat jumlah Pengeluaran Pemerintah, maka semakin meningkat pula Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dwi Septian Awaluddin, Sjamsu Djohan, Erwin Kurniawan (2020) dengan judul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur" yang mengatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini juga sesuai dengan teori dalam model makroekonomi yang dikembangkan oleh Keynes, peningkatan PDB dipengaruhi oleh kenaikan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor. Peningkatan pengeluaran pemerintah terjadi seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian. Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan mempengaruhi konsumsi yang terjadi di masyarakat. Selain itu pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan maupun pendidikan juga mempengaruhi peningkatan produktivitas yang berdampak pada peningkatan output produksi, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

##### **Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil regresi ditemukan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika diasumsikan apabila Tenaga Kerja meningkat sebesar 1% maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 4.215298. Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, artinya semakin meningkat

jumlah Tenaga Kerja, maka semakin meningkat pula Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nurul Firiani (2018) dengan judul "Pengaruh Tenaga dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY" yang mengatakan bahwa variabel Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DIY. Penelitian ini juga sesuai dengan Todaro (2000), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasar domesiknya lebih besar. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah.

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung sebesar 9.842048 dengan probabilitas sebesar 0.001901. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel Pengeluaran Pemerintah yang dilihat dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Tenaga Kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

## **5. PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil analisis data yang dilakukandiperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja secara Parsial dan Signifikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja secara Simultan dan Signifikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.654544 artinya sebesar 65,45% variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi mampu dijelaskan oleh variabel-variabel bebas Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja. Sedangkan 34,55% sisanya dijelaskan oleh Variabel- Variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### **Saran**

Dari hasil penelitian, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (Pengeluaran Pemerintah) berpengaruh secara parsial, simultan dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti berharap kepada Pemerintah untuk meningkatkan Pengeluaran Pemerintah khususnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan melihat dan menggali potensi pemasukan Pendapatan Asli Daerah.
2. Tenaga kerja berpengaruh secara parsial, simultan dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti berharap kepada Pemerintah untuk meningkatkan produktifitas Tenaga Kerja dengan Pelatihan Khusus untuk Tenaga Kerja serta Berwirausaha.
3. Peneliti berharap, untuk penelitian selanjutnya harus mampu memberikan dan mengembangkan penelitian serta mengembangkan variabel-variabel bebas terkait dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung (pengeluaran pemerintah) dan tenaga kerja yang berkaitan dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : Penerbit BPFE : 1988
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. (2014). *Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2014*. Nusa Tenggara Timur
- Dumairy. 1996, *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta
- Guritno, 1999 *Pengeluaran Pemerintah*, (Jakarta : Grafindo)
- Lincoln Arsyad. 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta, BPFE-UGM
- Triyanto Suseno Widodo. 1990, *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Todaro, Michael P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan, Edisi Ketujuh, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Widarjono Agus. 2013, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN)

## JURNAL

- Ahmad Jazuli Rahman, 2016 “*Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun 2010-2014*”
- Devi Novita Sari, 2017 “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Tengah*”
- Nurul Fitriani, 2018 “*Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2007-2015*”
- Yosi Rafica Palupy, 2018 “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah*”